

## BAB VI

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Eksternalisasi adalah ketika sebuah negara secara langsung atau tidak langsung melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian perbatasan di luar wilayahnya sendiri, seperti di negara lain atau di perairan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan negara transit dan asal peralatan, mengajar mereka cara mengelola perbatasan mereka, atau menerapkan kesepakatan kembali. Eksternalisasi dinilai dapat membantu menghindari kewajiban hukum, terutama di bidang suaka. Operasi yang di eksternalisasi sering terjadi dalam konteks yang tersembunyi dari pandangan publik, yang memungkinkan aktor tidak hanya untuk menghindari tetapi juga melanggar kewajiban hukum dengan risiko yang jauh lebih rendah untuk bertanggung jawab.

Arus migrasi yang terjadi di kawasan Eropa, terkhusus negara terluar Eropa seperti Italia disebabkan oleh beberapa faktor seperti kedekatan geografis, ketidakstabilan politik di kawasan Afrika yang menyebabkan kerentanan ekonomi dan kualitas hidup yang tidak baik. Per tahun 2022-2024 sebanyak 329.099 migran menyebrangi Laut Mediterania yang berbahaya dengan total kasus hilang & tenggelam di laut sebanyak 8.791 selama periode tersebut.

Keinginan untuk mencari perlindungan dan pengubah hidup hadir pada migran, Eropa adalah wilayah yang memungkinkan untuk memberikan perlindungan kepada mereka sehingga perjalanan mereka dipenuhi dengan peristiwa yang tidak dapat dibayangkan. Para migran pada akhirnya menggunakan jasa Penyelundup Manusia (*People Smuggler*) untuk berhasil sampai ke wilayah Eropa. Mereka dapat mengalami pemerasan, penyiksaan, hingga eksploitasi pada perempuan selama perjalanan, tetapi bagi mereka tidak ada pilihan lain selain menggunakan jasa penyelundup.

Penyelundup memiliki jaringan yang tersebar dan dapat mengetahui jalur-jalur aman migrasi ilegal. Libya menjadi wilayah sibuk penyelundup bertemu dari berbagai negara di kawasan Afrika, karena mereka biasanya akan melanjutkan perjalanan dari Libya ke Italia. Faktanya, Italia tidak selalu menjadi negara tujuan utama para migran, namun karena kedekatannya dengan Libya sehingga dijadikan

sebagai pijakan pertama para migran di Eropa. Namun, hal ini pada akhirnya merugikan Italia.

Efektivitas kebijakan Meloni ditunjukkan oleh data migrasi terbaru. Pada tahun 2022, Italia menerima 105.131 pendatang ilegal, yang melonjak menjadi 157.651 pada tahun 2023 karena kondisi global yang memburuk. Namun, pada tahun 2024, jumlah pendatang turun drastis menjadi 66.317, turun hampir 60% karena kesepakatan bilateral, seperti kesepakatan dengan Tunisia, dan lebih ketat kontrol perbatasan. Meskipun demikian, pencapaian ini disertai dengan sejumlah masalah hukum dan etika yang signifikan.

Kebijakan pemerintah Meloni terhadap "Mediterrania" yang diperluas" didorong oleh tiga tujuan utama: meningkatkan profil Italia sebagai negara yang memimpin pendekatan baru yang lebih adil dan tidak paternalistik terhadap negara-negara Afrika, membatasi jumlah kedatangan migran tidak teratur ke Italia melalui jalur Mediterranean, dan meningkatkan kemitraan ekonomi dengan pemerintah daerah, terutama terkait kesepakatan energi.

Kebijakan luar negeri Italia diselaraskan dengan kepentingan negara tersebut, baik di lingkup nasional hingga internasional. Negara-negara anggota Uni Eropa memiliki kepentingan mereka sendiri untuk dikejar, tetapi jika mereka membungkainya dalam visi Eropa yang lebih luas, hal itu akan memberi mereka keuntungan.

Pemerintahan Giorgia Meloni mengeluarkan *Decreto Flussi* (Dekret Arus) sebagai upaya untuk mengatur masuknya migran legal secara tahunan berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja nasional. Melalui kebijakan ini, pemerintah Italia menjalin kerja sama bilateral dengan sejumlah negara kawasan Afrika. Dalam *Decreto Flussi* periode 2023–2025 jumlah kuota meningkat secara signifikan, yakni hingga 452.000 migran dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, kebijakan ini juga membuka jalur migrasi aman dan legal untuk mengurangi ketergantungan terhadap jalur migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Pendekatan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara kebutuhan demografis-ekonomi Italia dan kontrol ketat terhadap arus migrasi tidak teratur.

Kebijakan migrasi Italia menjadi perwujudan langsung dari strategi eksternal kawasan Mediterranean, di mana eksternalisasi berperan sebagai instrumen utama

diplomasi regional. Melalui pendekatan ini, Italia membangun kemitraan “pengelolaan migrasi bersama” dengan negara tetangga selatan sebagai bagian dari stabilisasi geopolitik dan perlindungan perbatasan luar UE. Dalam praktiknya, hal ini menciptakan dualitas antara tujuan kemanusiaan dan agenda keamanan. Di satu sisi, Italia berupaya mengontrol arus migrasi melalui kerja sama regional; di sisi lain, kebijakan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan pengungsi, terutama non-refoulement dan akses ke suaka yang adil.

Teori sekuritisasi memiliki objek rujukan yang terlihat terancam dan memiliki justifikasi yang valid untuk mempertahankannya. Dalam hal ini objek rujukan yang terancam karena kehadiran imigran ilegal seperti nilai-nilai budaya, persaingan ekonomi, dan stabilitas domestik. Teori ini berhasil membenarkan kebijakan migrasi Italia dalam kerangka eksternalisasi, namun tidak menganalisis kepentingan nasional yang ingin dituju oleh Italia, sehingga penggunaan konsep kebijakan luar negeri dijadikan sebagai pelengkap untuk melihat kepentingan nasional Italia yang berupa keinginan untuk memperluas kekuasaan/pengaruhnya di kawasan Afrika & UE serta ingin mengurangi arus imigran ilegal.

Saran untuk penelitian kedepannya bisa melihat bagaimana kebijakan migrasi era Giorgia Meloni terutama dalam Pusat Suaka Albania dan Mattei Plan. Dikarenakan adanya batasan penelitian sehingga kinerja dua kebijakan tersebut belum dapat dilihat, batasan penelitian ini dari tahun 2020-2024 dan jika ingin meneliti topik ini bisa dilihat bagaimana perkembangan migran ilegal yang dikirim ke Pusat Suaka Albania, juga melihat perkembangan pembangunan kawasan Afrika dalam kerangka Mattei Plan. Selain itu, dalam penelitian ini tidak menganalisis bagaimana dampak dari kebijakan migrasi Italia terhadap pertumbuhan penduduk yang berpengaruh pada penyediaan tenaga kerja.